

Yayasan Pengkajian Pemberdayaan Masyarakat Sulawesi Selatan 1989-2017

Aulia Sari, M. Saleh Madjid, M. Rasyid Ridha
Pendidikan Sejarah FIS UNM
auliasari254@ymail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang Yayasan Pengkajian Pemberdayaan Masyarakat Sulawesi Selatan (YKPM) Sulsel adalah *Non-governmental organizations* (NGO) yang secara umum mengkaji terkait permasalahan-permasalahan sosial dan melakukan pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan pembangunan khususnya di Sulawesi Selatan. YKPM sendiri lahir dari realitas yang terjadi di wilayah Sulawesi Selatan, yakni kekangan pemerintah Orde Baru dari segi sosial dan ekonomi dimana sangat membutuhkan pengembangan dan pemberdayaan. Dengan kondisi sosial dan politik maka terbentuk YKPM dengan program-program terkait permasalahan-permasalahan sosial terkait partisipasi masyarakat, perempuan, anak, dan kondisi sosial yang membutuhkan pengkajian dan pengembangan. Penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan penelitian historis (*Historical Research*), yang terdiri atas beberapa tahapan yakni: (1) Heuristik, mengumpulkan tulisan tentang YKPM dari berbagai bentuk berita, arsip, profil dari YKPM, beberapa buku diantaranya: Taktik Politik Gratis (Audit Sosial Pendidikan dan Kesehatan Gratis Berbasis Komunitas di Kota Makassar), Meretas Kebijakan Program Pro Rakyat (pembelajaran Audit Sosial dan Partisipasi Warga dalam Pembangunan di Kota Makassar), Ketika Pembangunan Berpihak (Meretas Kebijakan Program Pro Rakyat), Menuju Masyarakat Partisipatif, dan Pengembangan Masyarakat wacana dan Pratik. (2) Kritik atau proses verifikasi keaslian sumber sejarah. (3) Interpretasi atau penafsiran sumber sejarah, dan (4) Historiografi, yakni tahap penulisan sejarah.

Kata Kunci : *Hak Asasi Manusia, Lembaga Swadaya Masyarakat, Yayasan Pengkajian Pemberdayaan Masyarakat*

Abstract

Work seeks to explain that the South Sulawesi Social Studies and Empowerment Foundation (YKPM) is a Non-governmental organization (NGO) that generally examines social issues and community empowerment in enhancing development, especially in South Sulawesi. YKPM was born from the reality that occurred in the region of South Sulawesi, namely the restraints of the New Order government in terms of social and economic aspects which desperately needed development and empowerment. With social and political conditions, YKPM was formed with programs related to social issues related to community participation, women, children, and social conditions that require assessment and development. This research is a research with historical research approach (*Historical Research*), which consists of several stages, namely: (1) Heuristics, collecting writings about YKPM from various forms of news, archives, profiles from YKPM, several books including: Free Political Tactics (Community-Based Free Education and Health Audit in Makassar City), Hacking the Pro-People's Policy Program (learning Social Audit and Citizen Participation in Development in Makassar City), When Development Sides (Hacking Pro-People's Program Policies), Towards Participatory Communities, and Community Development discourse and Pratik.

(2) Criticism or the process of verifying the authenticity of historical sources. (3) Interpretation or interpretation of historical sources, and (4) Historiography, namely the stage of historical writing.

Keywords: *Human Rights, Non-governmental organization, Social Studies and Empowerment Foundation*

A. Pendahuluan

Pasca runtuhnya Orde Baru yang ditandai dengan pengunduran diri presiden Soeharto, dengan di mulainya era baru yakni Era Reformasi. Kondisi ini terjadi tidak terlepas dari kegelisahan masyarakat yang jenuh dengan pembungkaman dan pembatasan kebebasan menyampaikan pendapat, berekspresi, berserikat dan berkumpul, padahal hal tersebut telah di jamin dalam Undang-Undang Dasar Pasal 28 e. Dimulainya era baru diikuti pula dengan peningkatan jumlah LSM. Hadirnya Era Reformasi membawa dampak yang sangat signifikan terhadap penyaluran aspirasi masyarakat.

Kekuatan pemerintah Orde Baru sangat besar dan semuanya Kontrol penuh ditangan pemerintah bertujuan mengontrol masyarakat melalui pembatasan kegiatan partai politik dan organisasi sosial dengan alasan menciptakan kestabilan politik. Setelah dimulainya Era Reformasi hal tersebut mulai secara perlahan mengurangi fungsi kontrol pemerintah terhadap masyarakat dan di sisi lain membangkitkan kemandirian masyarakat di berbagai bidang baik dalam aspek sosial, politik, ekonomi, budaya serta bidang-bidang lainnya. Ruang politik yang semakin terbuka lebar pada Era Reformasi, seiring dibuka ruang kebebasan memberikan kesempatan pada kelompok-kelompok masyarakat bebas berekspresi dalam berbagai bentuk organisasi salah satunya organisasi non pemerintah dengan mengusung berbagai asas dan tujuan masing-masing. Tidak ada lagi hegemoni melalui tekanan seperti pada masa Orde Baru menyebabkan LSM dan organisasi politik

sosial lainnya berada dalam ruang yang sempit. Partai-partai politik dan berbagai organisasi sosial politik termasuk LSM tumbuh dengan subur bak bunga di musim semi.

Seiring roda waktu dari orde baru ke Reformasi membawa angin segar dimana politik pemerintahan semakin demokratis, LSM bersama pemerintah berjalan beriringan dalam memberikan sumbangsih penting dalam hal peningkatan hak-hak rakyat guna memajukan pembangunan. LSM hadir membantu pemerintah menyentuh langsung sisi dasar kehidupan sosial masyarakat. Karena terkadang pemerintah tidak menyentuh langsung masyarakat menjadikan banyak terjadi permasalahan-permasalahan sosial, seperti kemiskinan di berbagai daerah maupun sektor kota, kurangnya akses pendidikan, persoalan perempuan dan masih banyak lagi kasus sosial lainnya. Secara langsung maupun tidak langsung LSM secara umum dan juga yang ada di Sulawesi Selatan memiliki peranan besar dalam masyarakat, sesuai dengan fokus kajian masing-masing. Seperti Walhi yang bergerak di isu lingkungan Hidup, Solidaritas Perempuan Anging Mamiri yang bergerak mengkhususnya terkait isu perempuan, dan KontraS Sulawesi yang bergerak pada kasus tindak kekerasan dan penegakan HAM.

Dengan berdirinya YKPM Sulawesi Selatan menjadikannya menarik untuk di kaji lebih mendalam terkhusus mengungkap perjalanan terbentuknya YKPM Sulawesi Selatan dan kerja-kerja YKPM Sulawesi Selatan dalam menyentuh ranah-ranah dasar masyarakat, baik dalam meningkatkan SDM

melalui program-program yang berbaur langsung dengan masyarakat dan memprioritaskan kepada masyarakat marginal.

Pemerintah dalam menjalankan fungsinya kepada rakyat dinilai kurang maksimal termasuk dalam wilayah pengembangan masyarakat. YKPM hadir untuk membantu pemerintah dalam kemajuan kehidupan masyarakat sehingga menarik untuk diteliti perjalanan YKPM.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian sejarah dengan menggunakan metode yang sesuai dengan kaidah keilmuan sejarah, perlu kiranya memperhatikan unsur budaya dalam memilih metodologi yang akan dipilih dalam hal ini metode sangat penting adanya untuk mengoprasionalisa sikan temuan-temuan di lapangan (Najering, 2018; Najering and Ridha, 2018; Rifal, 2017; Rifal and Sunarti, 2018). Dalam hal hal ini dijelaskan sebagaimana berikut.

1. Heuristik

Tahap pertama dalam penelitian sejarah berupa pengumpulan sumber-sumber yang dikenal dengan istilah Heuristik. Heuristik artinya mencari dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah yang terkait dengan topik yang akan di kaji, yakni “Yayasan Pengkajian Pemberdayaan Masyarakat Sulawesi Selatan”.

2. Kritik Sumber

Kritik sumber merupakan bagian penafsiran dan pengkajian sumber. Proses yang menilai apakah sumber itu memiliki kredibilitas (kebiasaan untuk dipercaya) atau tidak. (Priyadi, 2012).

Sumber mengenai YKPM Sulsel pernah ditulis Mulyadi Prajitno dalam bentuk buku dengan judul “Taktik Politik Gratis” namun dalam buku itu hanya membahas satu program dari YKPM Sulsel yakni audit sosial. Sumber lain yang membahas YKPM Sulsel yaitu Profil YKPM Sulsel ditulis oleh team YKPM sendiri. akan tetapi, pembahasan mengenai YKPM hanya membahas point-point inti tidak membahas

secara lebih rinci. Sedangkan karya ini membahas secara lebih terperinci mengenai YKPM Sulsel dari awal terbentuknya tahun 1989 sampai pada tahun 2017.

3. Interpretasi

Pada tahap ketiga peneliti harus menafsirkan data-data yang telah diperoleh. Proses menafsirkan memerlukan ketelitian dari seorang penulis untuk memilah data mana yang penting untuk tema penelitian dan data mana yang tidak berkaitan dengan penelitian.

4. Historiografi

Dalam kaitannya dengan historiografi, yaitu proses penulisan sejarah banyak aspek yang terkait di dalamnya. Menurut Hexter, proses pengumpulan bukti-bukti sejarah, pengeditan sumber sejarah, penggunaan pemikiran dan imajinasi sejarah, dan sebagainya merupakan suatu proses yang tidak dapat dipisahkan dari historiografi. (Haryono, 1995)

C. Tinjauan Penelitian

1. Kondisi Politik di Makassar Tahun 1989

Peralihan kekuasaan pemerin-tah Orde Lama yang di pimpin Soekarno kepada Orde Baru yang di Pimpin oleh Soeharto tahun 1966 merupakan awal di mulainya kembali penegakan hak-hak asasi warga Negara, pemerintahan Orde Baru dengan gencar melaksanakan berbagai upaya-upaya dalam mengkampanyekan penegakan Hak Asasi manusia, akan tetapi hanya berjalan singkat.

Orde Baru telah menorehkan sejarah kelam pelanggaran HAM di Indonesia. Janji-janji Orde Baru tentang pelaksanaan HAM di Indonesia mengalami kemunduran yang sangat pesat sejak awal 1970-an hingga 1980-an. Setelah mendapat mandat konstitusional dari sidang MPRS, pemerintah Orde Baru mulai menunjukkan watak aslinya sebagai kekuasaan yang anti HAM yang di anggapnya sebagai produk barat. (Ubaedillah dan Abdul Rozak, 2015)

Pergantian kekuasaan di Indonesia Tahun 1966 merupakan awal baru

pemerintahan Soeharto dengan diawali dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966 sampai menjadi Tap MPR-Supersemar 1968, Pemerintahan yang diawali dengan sistem pemerintahan semi militerisme karena memasukkan ABRI dalam pusaran kekuasaannya, dengan begitu ABRI secara langsung menjadi tameng politik (Firdaus, 2013) di parlemen dan tameng “hidup” terhadap penerapan kebijakannya. Seiring dengan berjalannya Pemerintahan Orde Baru, Presiden Soeharto sebagai panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) memberlakukan dwi fungsi terhadap ABRI dalam pemerintahan yaitu politik dan hukum keamanan (Humkan) dengan begitu tentara yang idealnya menjadi pelindung NKRI dari ancaman luar telah menyalahi fungsinya dengan berbalik bersentuhan langsung dengan masyarakat sipil, seperti ketika terjadi suatu gejolak penolakan kebijakan terhadap pemerintah, dan yang menjadi basis pengamanan ialah tentara dengan begitu tentara bisa saja menjadi alat politik untuk mempertahankan kekuasaan.

Pada masa Orde Baru pada pemerintahan menekankan stabilitas nasional dalam program politik yang dijalankannya. Dan untuk itu, mencapai stabilitas nasional terlebih dulu diawali dengan apa yang disebut konsensus nasional. Berdasarkan semangat konsensus nasional itu pemerintah Orde Baru dapat melakukan tekanan-tekanan politik terhadap partai politik yang memiliki basis massa luas. Pemahaman bahwa partai politik menjadi sumber yang bisa mengganggu stabilitas Negara. Gagasan ini menuai Pro dan Kontra karena dianggap membatasi atau aspirasi politik dan membentuk partai-partai politik hanya kedalam golongan nasional, spiritual, dan karya. (Maful, 2010)

Lebih lanjut pemerintahan Orde Baru yang diperkuat oleh ABRI sebagai kekuatan militer dan Golkar dalam kekuatan politik (Sumarno, 2016) sudah banyak melakukan

kebijakan-kebijakan yang lewat batas dari nilai-nilai dasar kemanusiaan dalam mempertahankan kekuasaan. Rezim Orde Baru tidak segan menggunakan kekuatan militer termasuk untuk “menghabisi” pihak-pihak yang kontra dengan Orba dan hal ini didukung oleh Konstitusi Negara yaitu peran Dwi Fungsi ABRI dalam melibatkan tindakan keamanan sipil dalam Negara.

Keterlibatan ABRI dalam Keamanan Nasional (kamnas) mengakibatkan masalah yang panjang dan kompleks terutama ketika berhadapan dengan pihak masyarakat sipil yang kontra dengan pemerintahan, tentu hal ini tidak memenuhi rasa keadilan, dengan bahasa paling sederhana tentu pihak sipil yang menjadi korban, dan telah diketahui bersama bahwa ketika sipil yang tidak bersenjata berhadapan dengan aparat bersenjata tentu yang jatuh menjadi korban adalah pihak sipil. Tidak berhenti pada masalah jatuhnya korban saja namun lebih jauh lagi proses pencarian keadilan yang berimbang antara sipil dan militer sangat berat sebelah dan lagi-lagi merugikan korban sipil, tidak hanya itu penculikan dan penghilangan nyawa secara paksa aktivis juga menjadi catatan kelam militer dalam Negara ini, pihak korban tidak pernah mendapat jaminan hukum bahkan peradilan yang dilakukan oleh mamil (Mahkamah Militer) dalam sejarah Negara ini belum pernah menyatakan ABRI/TNI sebagai pihak yang bertanggung jawab atas *ekstraordinary crime* tersebut. Selanjutnya yang diseret ke pengadilan Mahkamah Militer (mamil) hingga Mahkamah Militer Tinggi (mahmilti) hanyalah pelaku lapangan saja tidak dapat menyentuh pertanggung jawaban komando.

Kondisi politik di tahun 1989 tidak lepas dari kekangan suatu sistem kekuasaan jika dilihat dari kaca mata demokrasi itu tidaklah berkeadilan terutama dari segi ekonomi dan sosial. Pemerintahan Indonesia di kuasai oleh pemerintahan yang otoriter dimana pembungkaman dan tindakan represif aparat keamanan akan

diterima kepada pihak yang kontra dengan pemerintah seperti kelompok kritis.

Wilayah Indonesia bagian timur di Sulawesi Selatan merasakan hal sama terhadap kondisi politik yang dijalankan pemerintahan Orde Baru saat itu, berbagai elemen masyarakat mulai sadar dan tergerak mulai melakukan perkumpulan-perkumpulan dari berbagai pihak untuk membicarakan kondisi pemerintahan otoriter yang berimplikasi terhadap kondisi masyarakat.

Pengaruh oleh kekuasaan pemerintah Orde Baru sangat besar terhadap kondisi politik, masyarakat tampil sebagai pihak yang seringkali terkena dampak berbagai kasus terjadi salah satunya seperti pembungkaman yang dilakukan oleh pihak aparat keamanan kepada kelompok kritis. Padahal Negara kita adalah Negara demokrasi dan Negara hukum dan kebebasan menyampaikan pendapat, berekspresi, berserikat dan berkumpul telah di atur dalam Undang-Undang Dasar dalam Pasal 28 e. akan tetapi, modernitas dan infrastruktur perkotaan yang di anggap “kelebihan” dari era Orde Baru (Makelo, 2018), dengan kondisi politik tersebut dibutuhkan gerakan alternatif.

2. Kondisi Sosial di Makassar Tahun 1989

Kondisi masyarakat di tahun 1989 tidak bisa lepas dari pengaruh rezim Orde Baru dengan situasi politik dimana demokrasi di Indonesia kian di pertanyakan. Penggambaran Kondisi sosial, politik, ekonomi, dan budaya saling mempengaruhi. Pemerintahan Soeharto di anggap sebagai titik akhir dari segala penyebab kondisi masyarakat tak terkecuali di Sulawesi Selatan.

Tidak hanya mengendalikan sektor pemerintahan, rezim Orde Baru juga sangat tertarik mengendalikan kondisi dari sisi sosial bahkan ekonomi. Tidak bisa di pungkiri bahwa masyarakat turut andil untuk mempertahankan kekuasaan rezim yang berjalan. Pengekangan yang terjadi melalui berbagai kebijakan dikeluarkan

mengatasnamakan rakyat namun fakta di lapangan hanya menguntungkan pihak penguasa.

Kondisi masyarakat Indonesia yang dikekang oleh sistem dari elit penguasa di era Orde baru sangat bertentangan dengan demokrasi dan cita-cita luhur yang tertuang dalam Pancasila dimana disebutkan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Keadilan hanya bisa di akses bagi segelintir orang dan hak-hak rakyat tidak terpenuhi, tidak sampai disitu sisi kemanusiaan di Indonesia kembali di pertanyakan di era Orde Baru ketika banyak penculikan dan pembungkaman sangat marak terjadi.

Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) tahun 1948 secara tegas diberikan pengertian dan pembagian HAM yakni bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal dan abadi sebagai anugerah tuhan yang maha esa, meliputi hak untuk hidup berkeluarga, hak untuk mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, hak kesejahteraan yang oleh karena itu tidak boleh di abaikan atau di rampas oleh siapapun. Selanjutnya, manusia juga mempunyai hak dan tanggungjawab yang timbul sebagai akibat perkembangan kehidupannya dalam masyarakat. (Burhan, 2014)

Pemerintahan Orde Baru tidak segan-segan menumpas segala bentuk-bentuk aspirasi masyarakat yang dinilai berlawanan dengan orde baru. Kasus pelanggaran HAM tanjung priok tahun 1984, kedung ombo tahun 1985-1989, peristiwa Talangsari 1989 merupakan bagian dari banyaknya kasus Pelanggaran HAM yang pernah dilakukan oleh Negara di era Orde Baru.

Kondisi lain yang dirasakan adalah akses yang sulit dari berbagai kebijakan dan program yang dikeluarkan pemerintah yang dirasakan sebagian besar masyarakat Indonesia hal tersebut didukung dengan

sistem pemerintahan Indonesia yang melibatkan ABRI.

Kesenjangan antara pemerintah dengan masyarakat terutama masyarakat lapis bawah mengakibatkan kurangnya partisipasi rakyat dalam pembangunan. Kesenjangan antara pemerintah dengan masyarakat mengakibatkan ada kekosongan yang membutuhkan gerakan alternatif salah satunya membangun masyarakat karena pembangunan sesungguhnya adalah membangun rakyat.

Membangun rakyat tentunya kita berbicara masalah kebutuhan rakyat masyarakat sering kali dianggap sepele, atau kadang karena keangkuhan birokrat yang amat terpesona mendewakan pembangunan bergaya *top-down*. Contohnya saja dianggap, jika masyarakat di bangunkan sebuah waduk, maka pastilah kemanafaatannya tinggi. Tetapi realisasinya belum tentu. Bahkan beberapa bangunan fisik yang di bangun pemerintah (tidak hanya waduk) tampak terbengkalai dan akhirnya dimakan rayap.

Timbul pertanyaan apakah sudah sesuai antara apa yang dibutuhkan rakyat dengan yang digarap pemerintah. Suatu contoh: di satu sisi prioritas rakyat adalah membutuhkan keterampilan, lapangan kerja, dan kesempatan berusaha. Sedangkan disisi lain pemerintah menggarap pendidikan formal, membuka kursus-kursus atau menyelenggarakan seminar peluang bekerja dan berusaha. Dalam konteks ini, jelas bahwa telah terjadi perbedaan persepsi. Sebenarnya rakyat tidak membutuhkan tersedianya piranti pendidikan formal maupun kursus tanpa kelanjutan. Untuk apa setelah lulus SD? Untuk apa setelah kursus selesai dijalankan? Sebab, yang paling dekat dengan kebutuhan rakyat adalah adanya peningkatan keterampilan dan pengetahuan, yang sekaligus dapat dimanfaatkan atau tertampung dalam pekerjaan. Hal demikian ini bukanlah terjebak oleh motivasi pikir pragmatis semata melainkan berlandaskan

pada kebutuhan nyata guna memperbaiki kualitas hidup rakyat. (Soetrisno, 1995)

D. Pembahasan

1. Terbentuknya Yayasan Pengkajian Pemberdayaan Masyarakat Sulawesi Selatan

Kemunculan dan perkembangan Lembaga Swadaya Masyarakat Indonesia tidak bisa di lepaskan dari dinamika Perkembangan kerangka kerja pembangunan dalam segala bidang. Gagasan pembangunan di masa Orde Baru sendiri memberikan sebuah janji besar akan tercapainya kesejahteraan sosial dan ekonomi, akan tetapi gagasan pembangunan ini dalam pertumbuhannya melahirkan sentralisasi kekuasaan dan peran Negara dalam kehidupan politik, itu tidak terlepas dari penerapan praktik politik yang mengedepankan stabilitas.

Cita-cita untuk mengimbangi peran hegemoni mendorong kelahiran LSM. Dalam pandangan aktivis LSM upaya mengubah watak otoriterisme negara kearah demokrasi lalu menguatkan pembangunan masyarakat yang maju menjadi prioritas perjuangan. Pemberian pendidikan politik, pengorganisasian, pembentukan komunitas-komunitas maupun advokasi kebijakan dilakukan di beberapa daerah. Tujuannya, menyebarkan ide-ide kritis dan alternatif serta menanamkan nilai-nilai dalam demokrasi seperti bagaimana masyarakat turut dalam berpartisipasi, kontrol, transparansi, pentingnya akuntabilitas, HAM, solidaritas sosial dan kesadaran Hukum. Mendorong pembentukan wadah-wadah yang terdiri dari petani, buruh, pedagang, perempuan, mahasiswa, serta kaum miskin kota.

Hal ini mendorong kesadaran masyarakat untuk turut terlibat aktif dalam proses pembangunan, berbagai elemen masyarakat mulai membentuk suatu wadah yang bisa turut dalam pengembangan masyarakat serta hak-haknya sebagai warga Negara tanpa adanya ikatan dengan pemerintah. Organisasi seperti inilah yang

biasa di sebut Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Melihat kondisi sosial politik di Era Orde Baru dikekang oleh sistem kekuasaan yang otoriter dan anti kritik melahirkan gagasan bahwa kurang sesuai dengan prinsip demokrasi yang berkeadilan. Pihak-pihak yang kontra tidak segan-segan di bungkam oleh pemerintahan saat itu. Sehingga beberapa aktivis yang tergabung melihat bahwa sangat di butuhkan sebuah gerakan alternatif.

Salah satu gerakan alternatif yang merupakan realisasi dari serangkaian diskusi dari sejumlah aktivis, mahasiswa, anggota Lakpesdam NU (Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama), PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia), HMI (Himpunan Mahasiswa Islam), dan mahasiswa Kristen di Makassar serta kesepakatan dewan pendiri terdiri dari 1) Mulyadi Prajitno, 2) Mus Jaya Lali Masir, dan 3) Mutiara serta Badan Pengawas terdiri dari 1) May Januar, 2) Pahir Halim, dan 3) Selle Ks Dalle adalah pembentukan suatu lembaga yang diberi nama “Lembaga Kajian Dan Pengembangan Masyarakat”, didirikan pada tanggal 20 juli 1989 dengan akte notaris no.15 tanggal 5 oktober 1989. Yang kemudian diubah nama menjadi Yayasan Pengkajian Pemberdayaan Masyarakat Sulawesi Selatan pada tahun 1999 dengan perubahan Akte No. 30 Tahun 1999 oleh Lola Rosalina, SH. (YKPM Sulsel , t.thn.)

Lembaga ini didirikan dengan latar belakang bahwa tujuan/cita-cita pembangunan bangsa Indonesia adalah menciptakan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyatnya secara demokratis dan partisipatif serta berkeadilan gender. Agar tercapainya tujuan/cita-cita tersebut perlu adanya perhatian pembangunan yang berorientasi pada keseimbangan tatanan masyarakat golongan miskin/marginal. Demikian juga perlu menggali potensi, aspirasi serta permasalahan masyarakat untuk kemudian diidentifikasi dan

dinamisasi kearah yang positif. Untuk membantu melengkapi peran dan fungsi yang demikian, maka dengan hadirnya Lembaga ini dengan tekad melakukan usaha-usaha dan kerja nyata. (YKPM Sulsel , t.thn.)

Pada perkembangannya YKPM Sulsel salah satu LSM yang pada saat itu terlibat aktif dalam pemajuan kesadaran rakyat akan pentingnya pengembangan rakyat guna memajukan pembangunan di Indonesia. Melihat bahwa pembangunan yang sesungguhnya adalah membangun rakyat, terutama rakyat marginal. Mulyadi Prajitno sebagai direktur pelaksana sejak tahun 1999 menghasilkan susunan pengurus, dimana Pembina/Pengawas terdiri dari 4 orang diantaranya May Januar sebagai ketua dan Selle KS. Dalle, Mutiara, dan Musjayali sebagai anggota.

Kepengurusan YKPM Sulsel terdiri 16 orang pengurus. Dimana pengurus tetap terdiri dari 14 orang dan 2 orang sebagai pengurus tidak tetap, serta 2 orang sebagai staf sekretariat dimana terdiri bagian keuangan dan administrasi. Selain itu, 8 orang staf lapangan termasuk *coordinator program*. Sisanya terdiri dari 4 orang sebagai *Volunteer* Lapangan. (YKPM Sulsel , t.thn.)

Pembentukan Lembaga ini sebagai bentuk gerakan alternatif dimana usaha untuk membangun masyarakat sipil lebih kuat, ada yang bergerak diwilayah advokasi Hukum, advokasi lingkungan, pengembangan Masyarakat, sedangkan Lembaga ini sendiri memiliki visi bagaimana memberdayakan dan mengkaji masyarakat khusus yang ada di Sulawesi Selatan. Sebagai alternatif untuk memperkuat rakyat miskin, kaum miskin kota, serta perempuan untuk terlibat dalam pembangunan.

2. Program-program yang Dijalankan Yayasan Pengkajian Pemberdayaan Masyarakat Sulawesi Selatan

Program-program yang dijalankan YKPM Sulsel lahir berdasarkan kondisi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. kondisi sosial yang dimaksudkan terkait kaum

miskin kota, kondisi anak, kondisi perempuan, keterlibatan rakyat dalam kebijakan pembangunan pemerintah serta kondisi masyarakat marginal yang membutuhkan sentuhan pengembangan dan pemberdayaan. Program-program yang di jalankan adalah program yang berkesinambungan dan terus di perjuangkan, misalkan dalam suatu program telah selesai jangka waktunya, tidak hanya sampai disitu YKPM Sulsel senantiasa mengawal dan mendampingi.

Selain itu, dalam menjalankan program-programnya YKPM Sulsel adalah sebagian besar programnya berbasis komunitas dimana orang-orang yang dianggap bisa dan telah mendapatkan pemahaman terkait isu dalam program yang dijalankan yang akan mengawal sendiri atau memperjuangkan kehidupannya, serta akan meneruskan di sesama anggota komunitasnya. Program-program yang akan dibahas adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1 Program-program yang di Jalankan YKPM Sulsel

No	Program	Waktu	Kerjasama
1.	Pendampingan Pekerja Anak dan Anak Jalanan	1998-1999	UNICEF Jakarta dan Komnas Perlindungan Anak
2.	Pendampingan Terhadap Pengayuh Becak	1999-2000	UNDP dan USAID/OTI
3.	Pelatihan Manajemen Organisasi Rakyat	1999-2000	FFPM
4.	Pendidikan politik yang demokratis berbasis otonomi daerah	2001-2002	CSSP dan KPMS
5.	Pendampingan istri Nelayan dan Keluarganya dengan program partisipasi Pengambilan Keputusan	2000-2001	Kedutaan Australia

6.	Pendampingan Orang Tua Pekerja Anak	1999-2002	Kedutaan Selandia Baru
7.	Program pendampingan Alternatif Anak Jalanan atau Pekerja Anak	2003-2004	Canada Fund
8.	Penguatan KPK (Komite Penanggulangan Kemiskinan)	2003	AusAID
9.	Pemberdayaan Perempuan Pengusaha Kecil	2004	KL2SS dan NZAID
10.	Advokasi Pedagang Asongan, Tukang Becak, Pengamen, Buruh, dan ABK	2002-2007	AusAID
11.	Voter Education	2005	KL2SS, UNDP dan Uni Eropa
12.	Reintegrasi Buruh Migran Indonesia	2006-2007	<i>International Migrant Organization (IOM)</i>
13.	Partisipasi Perempuan dalam Wilayah Publik	2011-2013	ACE dan Ford Foundation
14.	Audit Sosial	2010-2014	Tifa Foundation
15.	<i>Gender Watch</i>	2013-2017	Institut Kapal Perempuan
16.	Program Peduli	2016-2017	SAMIN

Sumber: Profil YKPM Sulsel (1998-2017)

E. Kesimpulan

Kondisi yang terjadi sekitar tahun 1998 tidak terlepas dari pemerintahan Orde Baru diperkuat oleh keterlibatan ABRI dalam perlibatan tindakan keamanan sipil dalam Negara. Hal itu, menjadikan Orde Baru pemegang penuh hampir dari segala aspek kehidupan masyarakat. Dimana kondisi sosial ekonomi terkekang oleh pemerintahan orde baru dimana rezim ini dikenal antri kritik. Dimana menjadikan ABRI menjadi dwi fungsi tidak segan-segan menumpas pihak yang kontra dengan

pemerintah. Pengembangan masyarakat dalam peningkatan kapasitas untuk mendorong pembangunan sangat diperlukan. Oleh karenanya, sangat dibutuhkan gerakan alternatif pembangunan yaitu dengan memajukan masyarakat.

Yayasan Pengkajian Pemberdayaan Masyarakat Sulawesi Selatan adalah organisasi yang bergerak diwilayah peningkatan pembangunan dengan memprioritaskan masyarakat marginal terutama yang penghidupannya berada dalam garis kemiskinan serta akses ke pengambilan keputusan dalam kebijakan publik dari pemerintah. YKPM Sulsel dideklarasikan pada tanggal 20 juli 1989 yang sebelumnya hanya berbentuk perkumpulan dan serangkaian diskusi-diskusi mengenai permasalahan sosial yang memang membutuhkan uluran tangan dari LSM. Selain itu, latar belakang didirikan bahwa tujuan/cita-cita pembangunan bangsa Indonesia adalah menciptakan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyatnya secara demokratis dan partisipatif serta berkeadilan gender. Sebelumnya YKPM Sulsel bernama Lembaga Pengkajian Masyarakat pada tahun 1989 dan berubah nama menjadi Yayasan Pengkajian Pemberdayaan Masyarakat dengan perubahan Akte No.30 tahun 1999. YKPM Sulsel dengan memfokuskan diri diwilayah Sulawesi Selatan akan tetapi aktif turut terlibat dengan jaringan-jaringan LSM di seluruh Indonesia. Dalam perkembangannya, YKPM Sulsel melakukan program terkait, kaum miskin kota, nelayan, perempuan, buruh migran, anak,dan kebijakan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip YKPM Sulsel. Profil Yayasan Pengkajian Pemberdayaan Masyarakat Sulawesi Selatan.
Firdaus, Dede Wahyu. *Kebijakan Dwifungsi Abri Dalam Perluasan Peran Militer*

Di Bidang Sosial Politik Tahun 1966-1998. Jurnal UPI: Bandung.

- Haryono. 1995. *Mempelajari Sejarah Secara Efektif.* Malang: Pustaka Jaya.
- Maf'ul, M. Arsyad. *Partai Politik pada Masa Orde Baru dan Orde Lama.* Supremasi, Volume V Nomor 2 Oktober 2010. Universitas Negeri Makassar : Jurnal
- Najering, R., 2018. Optimisme Ekonomi Nelayan di Tengah Pergolakan Politik Sulawesi Selatan 1954-1965. *Jurnal Kajian Sosial dan Budaya: Tebar Science* 2, 38-50.
- Najering, R., Ridha, M.R., 2018. Orang Bugis dalam Silang Budaya Bahari di Pelabuhan Sunda Kelapa. *Jurnal Kajian Sosial dan Budaya: Tebar Science* 2, 25-37.
- Rifal, 2017. Modernisasi dan Ekonomi Masyarakat Nelayan di Kampung Gusung Kotamadya Ujung Pandang Tahun 1954-1998. Universitas Indonesia, Depok.
- Rifal, P., Sunarti, L., 2018. The impact of modernization on the economy for fishermen in Makassar City. *Cultural Dynamics in a Globalized World.*
- Priyadi, Sugeng. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan Sejarah.* Yogyakarta: Ombak.
- Rozak, Abdul dan Ubaedillah. *Pancasila, Demokrasi, Ham dan Masyarakat Madani.*
- Soetrisno, Loekman.1995. *Menuju Masyarakat Partisipatif.* Yogyakarta: Kanisius
- Sumarno, *Perubahan Elektabilitas Partai Peserta Pemilu di Yogyakarta Tahun 1971-1999.* Unesa: e Jurnal Pendidikan Sejarah.
- Wirman Burhan. 2014. *Pendidikan Kewarganegaraan, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.* Jakarta:PT Rajagrafindo Persada